

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2022

LAPORAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2022

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

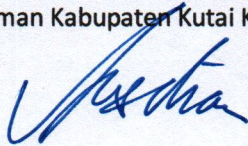
Assalamu'alaikum Wr. Wb.s

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk mengetahui penerapan dan ketercapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak sekedar untuk memenuhi kewajiban, namun sebagai bentuk tanggung jawab daerah untuk menyediakan layanan dasar secara minimal bagi masyarakat pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan ini menginformasikan sejauh mana pencapaian SPM dua bidang tersebut sudah diberikan kepada masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan program ke depan dan rencana tindak lanjut perbaikan. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini dan penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Akhir Kata, Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya terhadap kebijakan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 24 Januari 2023
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara,



H.MAMAN SETIAWAN,ST,MT
NIP. 19701005 199903 1 011

No.	Nama/Nip	Jabatan	Paraf
1.	AIDIL,SE,MSi Nip.19761201 200312 1 008	Sekretrais	
2.	Hemy Savitri Sriananda,SE,MM Nip.19721215 199803 2 007	Kasubag.Umum dan Ketatalaksanaan	
3.	Rina Arisandi,SE Nip.19731128 200801 2013	Perencanaan Ahli Muda	

KATA PENGANTAR

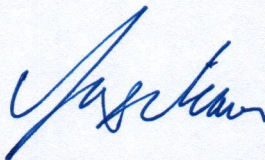
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk mengetahui penerapan dan ketercapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak sekedar untuk memenuhi kewajiban, namun sebagai bentuk tanggung jawab daerah untuk menyediakan layanan dasar secara minimal bagi masyarakat pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan ini menginformasikan sejauh mana pencapaian SPM dua bidang tersebut sudah diberikan kepada masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan program ke depan dan rencana tindak lanjut perbaikan. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini dan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Akhir Kata, Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya terhadap kebijakan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 24 Januari 2023
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara,



H.MAMAN SETIAWAN,ST,MT
NIP. 19701005 199903 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1	PENDAHULUAN
	1
A.	Latar Belakang
	1
B.	Dasar Hukum
	3
C.	Kebijakan Umum
	4
BAB II	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
	6
A.	BIDANG PEKERJAAN UMUM
1.	Jenis Pelayanan Dasar
	6
2.	Target Pencapaian SPM
	6
3.	Realisasi Pencapaian SPM
	7
4.	Alokasi Anggaran
	11
5.	Permasalahan dan Solusi
	12
B	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
1.	Jenis Pelayanan Dasar
2.	Target Pencapaian SPM
	14
3.	Realisasi Pencapaian SPM
	14
4.	Alokasi Anggaran
	15
5.	Permasalahan dan Solusi
	16
C.	DUKUNGAN PERSONIL
	19
BAB III	PROGRAM DAN SUB KEGIATAN
1.	Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerpan SPM
	22
BAB IV	PENUTUP
	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penetapan SPM, dan Mekanisme Penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: pendidikan; kesehatan; pekerjaan

umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencakup:

1. SPM Pekerjaan Umum

a) SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- 1) Jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- 2) Jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

b) SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. SPM Perumahan Rakyat

a) SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas:

- 1) Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

b) SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- 2) Jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun laporan penerapan SPM ini merupakan laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencakup Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 di atas mencakup:

1. SPM Pekerjaan Umum daerah kabupaten terdiri atas:

- 1) Jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. SPM Perumahan Rakyat daerah Kabupaten terdiri atas :

- 1) Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
-) Jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten

SPM ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tersurat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara terutama terkait isu air limbah, air bersih serta perumahan dan pemukiman sebagai berikut: potensi pencemaran air dan sungai yang cukup tinggi, kelangkaan air bersih pada wilayah terpencil, serta Kawasan kumuh yang berada pada pinggiran sungai dan pinggiran laut.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penerapan SPM Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 6) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar pelayanan Minimal.

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pengganti Peraturan Menteri dalam Negeri No.100 Tahun 2021.

C. Kebijakan Umum

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi yang hendak dicapai adalah *"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia"*.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan- kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam rangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Pemenuhan kebutuhan dasar ini selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan yang termaktub dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Di Indonesia, 17 tujuan TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam 4 pilar pembangunan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Tujuan TPB/ SDGs yang terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Tujuan ke enam, *"Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua"* dan Tujuan ke sebelas, *"Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan"* masuk dalam pelaksanaan Pilar Pembangunan Lingkungan. Paradigma baru yang dibawa oleh SDGs telah merubah pendekatan Pemerintah Indonesia dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Selaras dengan prinsip *"No One Left Behind"*, SDGs mendorong Agenda Pembangunan Nasional menjadi lebih partisipatif dan melibatkan multipihak yang luas baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs ini menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program,

kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. SPM sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sudah selayaknya tertuang dalam sistem perencanaan pembangunan.

Adapun jenis pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penjabaran tujuan dan sasaran dari Misi Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengakomodir pemenuhan pelayanan dasar secara minimal kepada masyarakat sebagai berikut. Pada Misi ke-4 Meningkatkan kualitas layanan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah yang berkompeten, tujuan 1 Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia, dengan sasaran Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah.

Sehingga dalam mewujudkan visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kedepan akan melaksanakan program Dedikasi dengan sub kegiatan strategis dan prioritasnya berupa:

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan permukiman kumuh dengan luas wilayah 10 (sepuluh)Ha;
- Pembangunan penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat;
- Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan;
- Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan;

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengarahkan integrasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah dengan membuat Tim Penerapan SPM yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada Tanggal 24 Desember Tahun 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan.

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintah lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indicator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan pengampuh SPM terkait seperti :

A. BIDANG PEKERJAAN UMUM

- 1. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Pekerjaan Umum meliputi;
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. Penyediaan Pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik
- 2. Target Pencapaian SPM oleh daerah:
Target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah 100 persen (%):

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga si seluruh Kab/kota	100%	2022
Penyediaan	Jumlah rumah tangga yang memperoleh	100%	2022

pelayanan pengelolaaan air limbah domestic	layanan pengelolaan air limbah domestik		
--	---	--	--

3. Realisasi Tahun 2022

Target Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Bidang Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah rumah tangga yang berhak mendapat layanan	Jumlah rumah tangga yang terlayani	Capaian (4): (3)x100 %
Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/kota	172,099	131,960	76,68
Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	172,099	4,794	2,79

Presentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Layanan PDAM	Perpipaan Perdesaan	Non Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5+6+7)	10 = (8/4*100)
1	Tenggarong	109,466	26,699	27,177	68	33	27,278	76,68%
2	Tenggarong Sbr	69,581	15,996	12,783	1,129	149	14,061	
3	Loa Kulu	54,124	12,442	4,177	1,899	1,108	7,184	
4	Loa Janan	70,544	16,217	14,783	575	606	15,964	
5	Sebulu	41,048	9,436	4,498	539	566	4,603	
6	Anggana	35,813	8,233	3,737	1,660	1,250	6,647	
7	Muara badak	47,373	10,890	2,798	1,722	3,715	8,235	
8	Muara Jawa	42,224	9,707	5,759	248	771	6,778	
9	Samboja	68,016	15,636	5,111	842	627	6,580	

10	Sanga-sanga	20,178	4,639	3,046	155	118	3,319
11	Kota Bangun	36,301	8,345	2,945	2,257	1,499	6,701
12	Muara Wis	9,287	2,135	534	480	12	1,026
13	Marang Kayu	27,205	6,254	2,138	848	848	3,834
14	Muara Kaman	42,698	9,816	3,957	1,996	2,218	8,171
15	Muara Muntai	20,308	4,669	2,784	296	730	3,245
16	Kenohan	11,701	2,690	568	1,102	467	2,100
17	Kembang Janggut	23,972	5,511	2,340	2,074	116	3,880
18	Tabang	12,111	2,784	634	337	131	847
TOTAL		741,950	172,099	98,769	18,227	14,964	131,960
Sumber Data :							
*Bidang Penyehatan Lingkungan DPKP							

Kabupaten/Kecamatan										
	Jiwa	Rumah Tangga	Layanan PDAM (RT)	Perpipaan Perdesaan (RT)	Non Perpipaan (RT)	TOTAL PDAM	PERDESAAN (%)	PDAM (%)	PERDESAAN (%)	PERKOTAAN PERDESAAN (%)
Total Kabupaten	741,950	172,098	98,769	18,227	14,964	98,769	51,418	57,40%	29,87%	76,68%
Anggana	35,813	8,233	3,737	1,660	1,250		2,910		35,34%	
Kembang Janggut	23,972	5,511	2,340	2,074	116		2,190		26,60%	
Kenohan	11,701	2,690	568	1,102	467		1,569		58,32%	
Kota Bangun	36,301	8,345	2,945	2,257	1,499		3,756		45,01%	
Loa Janan	70,544	16,217	14,783	575	606		1,181		7,28%	
Loa Kulu	54,124	12,442	4,177	1,899	1,108		3,007		24,16%	
Marangkayu	27,205	6,254	2,138	848	848		1,696		72,11%	
Muara Badak	47,373	10,890	2,798	1,722	3,715		5,437		49,92%	
Muara Jawa	42,224	9,707	5,759	248	771		1,019		10,49%	
Muara Kaman	42,698	9,816	3,957	1,996	2,218		4,214		42,92%	
Muara Muntai	20,308	4,669	2,784	296	730		1,026		21,97%	
Muara Wis	9,287	2,135	534	480	12		492		23,04%	
Samboja	68,016	15,636	5,111	842	627		1,469		9,40%	
Sanga-sanga	20,178	4,639	3,046	155	118		343		7,40%	
Sebulu	41,048	9,436	3,498	539	566		1,105		11,71%	
Tabang	12,111	2,784	634	337	131		468		16,81%	
Tenggarong	109,466	26,699	27,177	68	33		101		0,37%	
Tenggarong Seberang	69,581	15,996	12,783	1,129	149		1,278		7,99%	

Sumber Data :
* Perumda Tirta Mahakam PDAM

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
No	Kecamatan	L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	Anggana	18.641	17.172	35.813
2	Kembang Janggut	12.594	11.378	23.972
3	Kenohan	6.217	5.484	11.701
4	Kota Bangun	18.704	17.597	36.301
5	Loa Janan	36.912	33.632	70.544
6	Loa Kulu	28.178	25.946	54.124
7	Marangkayu	14.073	13.132	27.205
8	Muara Badak	24.619	22.754	47.373
9	Muara Jawa	21.952	20.272	42.224
10	Muara Kaman	22.71	19.988	42.698
11	Muara Muntai	10.561	9.747	20.308
12	Muara Wis	4.937	4.350	9.287
13	Samboja	35.586	32.430	68.016
14	Sanga-sanga	10.323	9.855	20.178
15	Sebulu	21.616	19.432	41.048
16	Tabang	6.389	5.722	12.111
17	Tenggarong	56.077	53.389	109.466
18	Tenggarong Seberang	36.214	33.367	69.581
TOTAL		386.303	355.647	741.950
Sumber Data : *BPS				

DATA PENDUDUK MENURUT KEPALA KELUARGA JENIS KELAMIN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
No	Kecamatan	L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	Anggana	9.625	1.848	11.473
2	Kembang Janggut	6.664	1.214	7.878
3	Kenohan	3.156	668	3.824
4	Kota Bangun	9.556	2.054	11.610
5	Loa Janan	20.192	3.995	24.187

6	Loa Kulu	14.786	2.861	17.647
7	Marangkayu	7.209	1.604	8.813
8	Muara Badak	12.769	2.612	15.381
9	Muara Jawa	11.180	2.022	13.202
10	Muara Kaman	11.694	1.924	13.618
11	Muara Muntai	5.380	1.157	6.537
12	Muara Wis	2.440	535	2.975
13	Samboja	18.387	3.706	22.093
14	Sanga-sanga	5.398	1.261	6.659
15	Sebulu	11.087	2.279	13.366
16	Tabang	3.201	618	3.819
17	Tenggarong	28.493	6.072	34.565
18	Tenggarong Seberang	19.473	3.495	22.968
		200.690	39,925	240.615

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa Tangki Sepick Individual (SPALD-S & SPALD-T)	Jumlah rumah yang Impur tinjanya telah diolah di IPLT	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/3*100)
1	Tenggarong	109,466	26,699	222	150	372	2,79%
2	Tenggarong Seberang	69,581	15,996	373	5	378	
3	Loa Kulu	54,124	12,442	278	3	281	
4	Loa Janan	70,544	16,217	173	1	174	
5	Sebulu	41,048	9,436	580	67	647	

6	Anggana	35,813	8,233	100	-	100
7	Muara Badak	47,373	10,890	335	-	335
8	Muara Jawa	42,224	9,707	0	-	-
9	Samboja	68,016	15,636	302	-	302
10	Sanga-sanga	20,178	4,639	54	-	54
11	Kota Bangun	36,301	8,345	645	2	647
12	Muara Wis	9,287	2,135	116	-	116
13	Marang Kayu	27.205	6,254	172	-	172
14	Muara Kaman	42,698	9,816	370	-	370
15	Muara Muntai	20,308	4,669	352	-	352
16	Kenohan	11,701	2,690	259	-	259
17	Kembang Janggut	23,972	5,511	144	-	144
18	Tabang	12,111	2,784	91	-	1,957
	TOTAL	741,950	172,099	4,566	228	4,794

Sumber Data :
* Bidang Penyehatan Lingkungan DPKP, Dinkes

4. Alokasi Anggaran
- Anggaran dialokasikan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah Anggaran APBD + APBN Kabupaten :
- Tahun 2022 Rp. 156.670.892.784

5. Permasalahan dan solusi

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Permasalahan dalam pencapaian Indikator 1 : ➤ Adanya Daerah yang tidak tersedianya air baku permukaan untuk Sumber Air Minum Aman. ➤ Tidak ada Baseline Data	➤ Saling mendukung antar wilayah dalam memanfaatkan pemenuhan air baku. ➤ Perlunya terhadap kajian teknis dalam menangani air baku dalam teknologi penjernihan. ➤ Perlunya Anggaran Pihak Ketiga untuk melakukan Baseline data	➤ Melakukan kerjasama dengan PDAM terdekat dalam pemenuhan air curah untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air minum yang aman. Khususnya di wilayah Delta Mahakam Kab. Kutai Kartanegara.
	➤ Akses wilayah daerah yang berjauhan	➤ Perlunya pengolahan air minum yang tepat baik segi konstruksi dan biaya	➤ Melakukan kajian terhadap ketersediaan air baku yang dirubah menjadi air minum aman.
	➤ Jumlah Kapasitas Pengolahan Limbah Domestik yang belum maksimal ➤ Daerah atau Desa memiliki eksiting rawa atau genangan air	➤ Perlunya terhadap kajian teknis dalam menangani air limbah. ➤ Perlu adanya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pentingnya limbah domestik	➤ Melakukan penambahan unit armada pelayanan serta unit pengolahan ➤ Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat
2	Permasalahan dalam pencapaian Indikator 2 : ➤ Minimnya perencanaan karena kurang validnya data terkait penerapan SPM.	➤ Perlu sisten pendataan dan inventarisasi data terkait penyusunan dan penerapan SPM	➤ Melakukan pembuatan system pendataan dan inventarisasi data.
	➤ Minimnya koordinasi antar OPD pengampuh SPM terkait kebutuhan data penyusunan SPM.	➤ Perlu ada Tim SPM Tingkat kabupaten yang mengkoordinir tiap OPD pengampu SPM.	➤ Tim yang telah dibentuk, perlu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam penerapan SPM.
	➤ Tidak ada database yang valid yang dapat menjadi standar	➤ Perlu ada sebuah tim yang bertanggungjawab sebagai sumber database yang valid.	➤ Membentuk Tim yang bertanggungjawab sebagai sumber database.

	acuan dalam penyusunan SPM.		
	➤ Kurangnya anggaran terkait penerapan SPM.	➤ Adanya alokasi anggaran memadai terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian SPM.	➤ Pengajuan anggaran terkait kegiatan yang mendukung penerapan SPM.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Bidang Pekerjaan Umum

Program, kegiatan,Sub kegiatan Dinas Prumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat digambarkan dalam table sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan
1	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis SPAM 2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 5. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 6. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 7. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2	Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 4. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Lumpur Tinja

BIDANG: SPM PEKERJAAN UMUM

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2022			Ket
		Jumlah Rumah Tangga yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani	Capaian (4):(3)x 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga si seluruh Kab/kota	172,099	131,960	76,68	
2. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	172,099	4,794	2,79	

B.BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi;
- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Target Pencapaian SPM oleh daerah:
- Target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 100 persen (%):

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	Jumlah rumah layak huni dan direhabilitasi bagi korban bencana	100%	2022

bencana kabupaten			
Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	2022

3. Realisasi Tahun 2022

Target Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4): (3)x100%
1	2	3	4	5
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah layak huni dan direhabilitasi bagi korban bencana	0	0	0
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah	30	30	100

Presentase Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	$6 = (5 / 4 \times 100)$	7
1	Tabang	Muara Pedohon	30	30	100%	
Total			30	30		

Sumber Data :

* Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman

Jumlah rumah tangga yang berhak mendapat layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01/590/PL/DPPR/VII/2020 tentang penetapan lokasi untuk lahan relokasi Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang sejumlah 94 unit, dilaksanakan pada APBDP 2020 sebanyak 2 unit, dan pada APBD 2021 dilaksanakan sebanyak 8 unit. Sampai dengan 2021 sudah direalisasi 10 unit, dan untuk tahun 2022 sebanyak 30 Unit.

4. Alokasi Anggaran

Anggaran dialokasikan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah Anggaran APBD Kabupaten :

- Tahun 2021 Rp. 5.250.000.000,-

5. Permasalahan dan solusi

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Jenis/status/kategori bencana yang terjadi belum ditetapkan melalui Keputusan Bupati	Mendorong penyusunan payung hukum terkait penetapan jenis/status/kategori bencana daerah	Koordinasi dengan OPD terkait dan Bagian Hukum Setda terkait penyusunan payung hukum dimaksud
2	Belum dilakukannya serah terima aset	Fasilitasi untuk Penyerahan aset	
4	Minimnya penguasaan SDM terhadap teknik observasi data dasar penunjang SPM relokasi program pemerintah (Kawasan , pemetaan kawasan berpotensi relokasi, sehingga berdampak pada minimnya keterlibatan ASN dalam melaksanakan SPM di Perkim dan OPD terkait.	Perlu Pelatihan terhadap Tim pelaksana SPM di Dinas dan OPD terkait Perlu sistem pendataan dan inventarisasi data terkait penyusunan dan penerapan SPM.	Mendorong diadakannya Pelatihan terhadap Tim pelaksana SPM di Dinas dan OPD terkait Mendorong pengoptimalan peran dan fungsinya anggota-anggota tim dalam menjalankan tugas berkaitan dengan penerapan SPM di OPD.
5	Kurang optimalnya koordinasi dan perencanaan terkait penerapan SPM di daerah menjadikan rendahnya dukungan anggaran terkait pendataan, serta penerapan pelayanan SPM Dinas Perkim.	Perlu ada Tim SPM Tingkat Kabupaten yang mengkoordinir tiap OPD pengampu SPM dari tahap perencanaan,pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Perluadnya sistem dan pendampingan yang memudahkan pelaksanaan teknis mengerjakan tugas terkait urusan wajib SPM yang dimaksud.	Mendorong pengaktifan Tim SPM daerah yang mengkoordinir dan melakukan pendampingan terhadap Tim SPM di OPD DPKP/Perkim

PROGRAM DAN KEGIATAN

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No:	Program	Sub Kegiatan
1.	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

BIDANG: SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2022			Ket
		Jumlah Orang yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4):(3)x 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah rumah layak huni dan direhabilitasi bagi korban bencana	0	0	0	
2.Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Pemerintah Daerah	30	30	100	

C. DUKUNGAN PERSONIL

Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), dibantu 1 (satu) orang pejabat struktural Eselon IIIa, 4 (empat) orang pejabat struktural IIIb dan 3 (tiga) orang pejabat struktural eselon IV, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Kepala Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Kepala Bagian Kepegawaian;
 3. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
 1. Sub Koordinasi Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Sub Koordinasi Pembinaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
 3. Sub Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman
- d. Bidang Penyehatan Lingkungan ,membawahkan:
 1. Sub Koordinasi Bina Teknis
 2. Sub Koordinasi Pembangunan Sarana Air Bersih
 3. Sub Koordinasi Bangunan Infastruktur Penyehatan
- e. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan;
 1. Sub Koordinasi Kebersihan;
 2. Sub Koordinasi Pertamanan dan Pemakaman
- f. Bidang Teknis ,membawahkan;
 1. Sub Koordinasi Perencanaan Teknis
 2. Sub Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 3. Sub Koordinasi Inventarisasi dan Pelaporan

Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kbupaten Kutai Kartanegara ,per 30 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia sebanyak 206 yang dklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data pejabat struktural Tahun 2022. Sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) jumlahnya sebanyak 151 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Personil	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
	Kepala Dinas	1
	Sekretaris	1
	Kepala Bidang	4
	Kasubag	3
	Kepala Seksi	11
	Fungsional Umum	186
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	151
	JUMLAH	357

Sumber : Kepegawaian Disperskim 2022

Kualifikasi Pendidikan

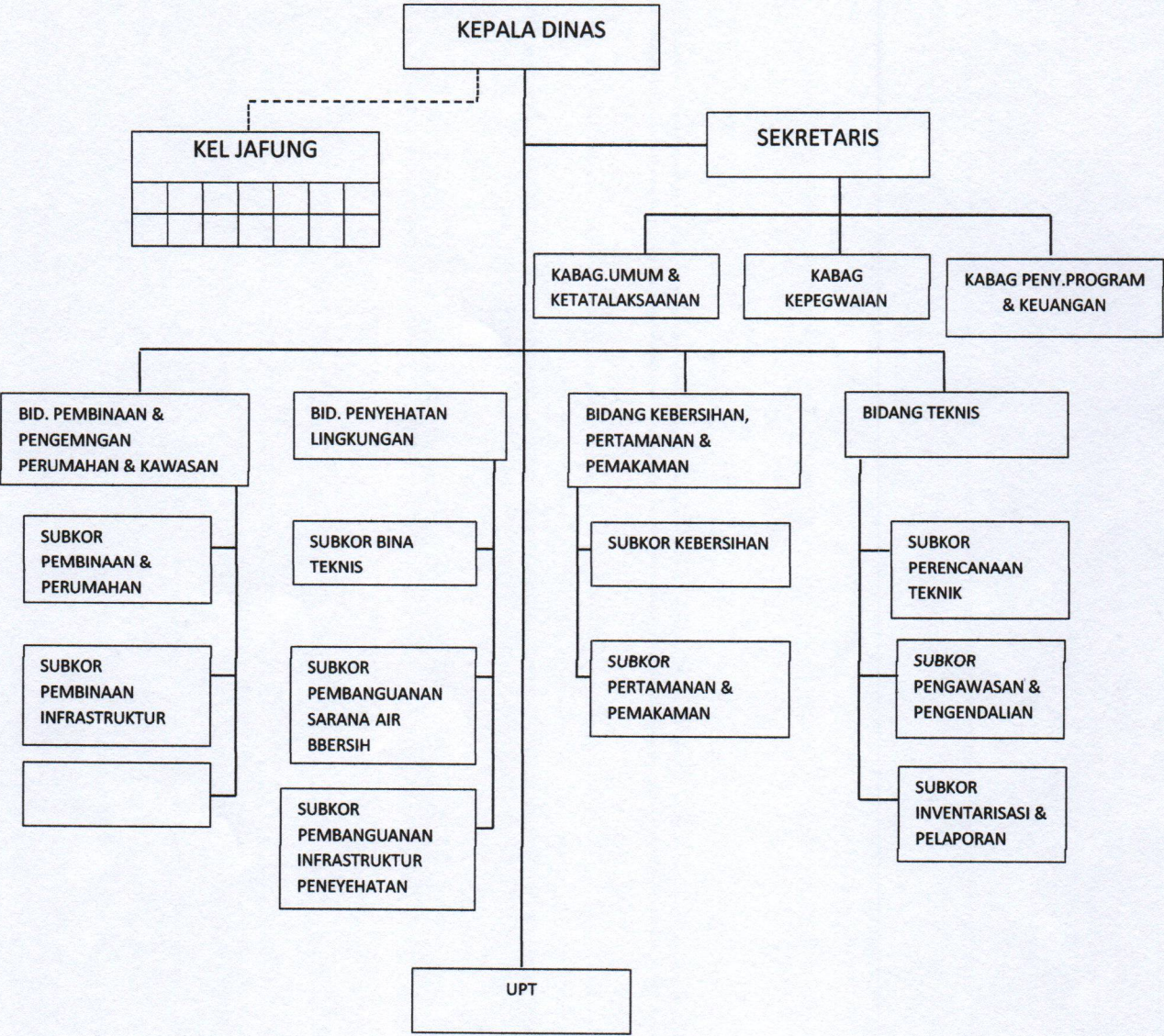
No.	Tingkat Pendidikan	PNS	THL
1	Magister	19	3
2	Sarjana	67	67
3	Diploma	6	9
4	SLTA/SMK/STM	110	71
5	SLTP	4	-
6	SD	-	1
	Jumlah	206	151

Sumber : Kepegawaian Disperskim 2022

Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
3.	Pembina (IV/a)	11
4.	Penata Tingkat I (III/d)	49
5.	Penata (III/c)	12
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	14
7.	Penata Muda (III/a)	10
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	82
9.	Pengatur (II/c)	20

10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
11.	Pengatur Muda (II/a)	4
12.	Juru Tingkat I (I/d)	-
13.	Tenaga Harian Lepas (THL)	-
JUMLAH		206



BAB III

PROGRAM DAN SUB KEGIATAN

No	Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Keterangan
1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.160.000.000	2.082.762.118	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	16.287.828.700	15.831.735.230	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	31.190.230.488	30.577.397.812	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.351.059.422	7.219.283.633	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	41.720.032.912	40.046.942.275	
		Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	15.085.779.656	13.949.435.720	
		Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	22.214.725.829	21.434.868.615	
2.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	1.045.859.240	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	18.422.988.277	18.002.659.900	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala Permukiman	300.000.000	148.410.666	
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	196.430.000	127.680.000	
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpu Tinja	641.817.500	637.765.500	

No	Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Keterangan
3.	PEGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.250.000.000	5.190.727.009	

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan juga diperlukan penetapan pemetaan kondisi awal SPM terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM.

Demikian laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.